

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebuah karunia yang membanggakan bagi Indonesia adalah keragaman budaya yang tersebar dalam beribu pulau. Keragaman ini berupa keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman adat istiadat, yang satu sama lain sangat berbeda, tetapi berada dalam satu negara bangsa Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat lebih kurang 665 bahasa daerah, dan 300 suku bangsa yang tersebar pada 17.670 pulau besar dan kecil (Moeis, 2014:1).

Disisi lain ada kekhawatiran, dengan keragaman terus berkembang akan hilangnya kekuatan nilai-nilai tradisional, atau hal paling buruk adalah kehilangan jati diri baik individu atau kelompok. Sejak 15 tahun terakhir banyak sekali terjadi konflik yang muncul seperti bernuansa politik, atau bernuansa etnik, agama, ekonomi, maupun hanya sekedar perwujudan ketidak puasan antar kelompok.

Dalam kurun waktu empat tahun awal reformasi, berdasarkan data yang dikumpulkan INCIS (www/incis.or.id/2000) telah terjadi berbagai konflik seperti di Situbondo (Oktober, 1996), Tasikmalaya (Desember, 1996), Rengasdengklok (Januari, 1997), Bayuwangi (September, 1998), Ketapang (November, 1998), Ambon dan Sambas (1999). Konflik antar kelompok di berbagai daerah terus berlanjut hingga 10 tahun kedepannya seperti kerusuhan di awal tahun 2013 di NTB antar kelompok agama. Penyebab semua konflik tersebut disebabkan oleh, a) peristiwa ketegangan antar etnik, b) peristiwa belatar belakang agama, dan c) pertikaian antar kelompok dalam masyarakat (Moeis, 2014:2-3).

Keragaman etnik dan konflik saling mempengaruhi. Bila sebuah keragaman tidak dipahami dan dikelola dengan baik maka akan terjadi konflik, sebaliknya bila keragaman dikelola dengan baik, maka konflik dapat dihindari. Oleh karena itu perlu dimengerti bagaimana hakikat keragaman yang ada beserta karakteristiknya untuk dapat dikelola dengan baik. Keragaman etnik yang dimiliki Negara Indonesia dapat disebut sebagai unik. Sebagaimana diungkap oleh Hardiman, menyatakan bahwa keunikan itu terlihat dalam kenyataan dimana selain multietnik, bangsa Indonesia terdiri dari multimental (agama). Karena itu dapat disebut “Indonesia adalah sejumlah bangsa” dengan ukuran, makna, dan karakter yang berbeda-beda” (Moeis, 2014:3-4).

Akar identitas pada masyarakat dalam banyak aspek seperti perbedaan etnik, ras, agama, dan gender. Namun bentuk yang tertua dan banyak dikaji adalah dari sudut ras dan etnik. Sedangkan bentuk yang lain mengikuti perkembangan ras dan etnik. Misalnya agama, secara umum tahap awal berasal dari kebiasaan, terus jadi keyakinan dan paralel dengan perkembangan dalam etnik, demikian juga identitas gender berkembang dalam konteks etnik, agama dan begitu seterusnya. Pandangan yang melihat perkembangan etnik, tanpa mengaitkan dengan konteks sosio historis merupakan pandangan tradisional (Galkina, 1990). Pada awalnya sosiologi melihat fenomena etnik atas dua pandangan yaitu : “Primordialisme”, yang bermakna kesatuan dan solidaritas yang bersifat irasional, dan strukturalisme (instrumental) berupa ideologi yang dimanipulasi secara rasional atau diadaptasi secara sadar untuk mencapai tujuan (Moeis, 2014:63-65).

Disini kita juga melihat pandangan dasar dari penganut fungsionalisme struktural, mulai dari Auguste Comte melalui Emile Durkheim sampai Talcott Parsons dan para pengikutnya, maka faktor yang mengintegrasikan masyarakat berbeda etnik tentulah berupa kesepakatan para warga masyarakat dilingkungannya, berdasarkan nilai-nilai umum tertentu. Mengikuti pandangan Parsons, maka kelangsungan hidup masyarakat berbeda etnik tersebut, tidak saja menuntut tumbuhnya nilai-nilai umum tertentu yang disepakati besar oleh masyarakat-masyarakat di lingkungannya, akan tetapi lebih dari nilai-nilai umum tersebut, mereka juga menghayati melalui proses sosialisasi (Nasikun, 2005:80).

Dengan keanekaragaman sebuah etnik yang dimiliki, mampu membawa Indonesia kepada kondisi yang memiliki konsekuensi sebagai daya pemecah dan menimbulkan konflik. Dapat menghancurkan hasil peradaban manusia maupun sebagai daya perekat atau penyatu yang mampu melanggengkan tatanan kemasyarakatan yang telah lama dibentuk.

Di Indonesia transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah yang efektif untuk membantu atau mengurangi angka kepadatan penduduk. Tujuan dari transmigrasi itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi peserta transmigrasi tersebut. Daerah yang menjadi tujuan transmigrasi merupakan daerah yang masih memiliki penduduk yang jarang. Daerah-daerah tersebut terdiri dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya yang memiliki beribu hektar lahan subur siap untuk dimanfaatkan.

Akan tetapi program transmigrasi yang digalakkan oleh pemerintah sebagai salah satu program kebijakan kependudukan tidak selamanya membawa berkah

bagi kaum transmigran. Dibalik potensi kehidupan yang lebih terjamin, dalam program ini juga akan menimbulkan potensi konflik yang setiap saat bisa terjadi. Karena potensi konflik di daerah tujuan transmigrasi sangat besar, semua itu terjadi karena tidak adanya penyesuaian kebudayaan pendatang dengan budaya lokal, fanatisme kedaerahan, kecemburuan terhadap keberhasilan penduduk pendatang, dan perilaku penduduk pendatang yang menyinggung kebiasaan atau adat-istiadat penduduk lokal. Potensi konflik tersebut terjadi dengan kenyataannya setiap provinsi apa lagi daerah yang lebih kecil masih mempunyai karakteristik sosial budaya yang berbeda-beda. Karena perbedaan tersebut, wajar kalau terjadi sikap yang saling mempertahankan kebiasaan atau tradisi masing-masing.

Kabupaten Dharmasraya salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat menjadi tujuan transmigrasi, kedatangan warga transmigran menyebabkan daerah ini menjadi daerah multietnik, yang memiliki banyak etnik dan dua etnik dominan. Selain berbagai daerah multietnik muncul karena menjadi daerah pertumbuhan baru, ada dua etnik dominan yaitu etnik Minangkabau dan etnik Jawa. Keanekaragaman etnik yang dominan tersebut tidak dapat dilepaskan, semenjak adanya program transmigrasi pada tahun 1976, yang menjadi awal kedatangan para transmigrasi dari pulau Jawa menuju daerah Sumatera Barat. Penempatan transmigrasi terutama di perbatasan Jambi Kabupaten Dharmasraya yang dikenal dengan transmigrasi Sitiung.

Dharmasraya yang merupakan bagian dari daerah Minangkabau, terdiri dari beberapa kecamatan yang didalamnya. Nagari bukan saja merupakan satu kesatuan sosial, tetapi penduduk suatu nagari juga diikat oleh kehendak ingin

hidup bersama dengan rukun. Mereka juga patuh kepada norma-norma pergaulan hidup bersama (LKAAM, 1987:48-49). Di Nagari Sitiung terdapat dua etnik yang dominan, yaitu masyarakat etnik Minangkabau dan masyarakat etnik Jawa. Mereka telah hidup bersama atau berdampingan semenjak tahun 1976 sampai sekarang dalam suatu nagari. Orang-orang yang berasal dari etnik Jawa itu akhirnya menjadi satu perkauman teritorial dan mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama. Hal ini menimbulkan semangat gotong royong, saling tolong-menolong dan ingin menciptakan kedamaian sesama masyarakat yang ada di Nagari Sitiung. Bahkan segala permasalahan baik dan buruk semuanya dilaksanakan secara musyawarah, oleh masyarakat etnik Minangkabau dan masyarakat etnik Jawa.

Menurut sejarahnya keberadaan etnik Jawa sebagai pendatang di Nagari Sitiung, yaitu dengan adanya program transmigrasi semenjak tahun 1976. Wilayah ini sebelumnya termasuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, namun sejak pemekaran pada tahun 2004, namanya berubah menjadi Kabupaten Dharmasraya (<http://sumbar2.kemendagri.go.id>). Rata-rata mereka berasal dari daerah yang sama yakni transmigrasi bedol desa asal Wonogiri Jawa Tengah. Masyarakat transmigrasi tersebut didominasi oleh masyarakat dari pulau Jawa dan beberapa daerah di Sumatera Barat (program transmigrasi lokal).

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi di Indonesia yang telah dilaksanakan semenjak Pra Pelita pada tahun 1953 sampai sekarang dengan penempatan transmigrasi sebanyak 29.573 KK dan 125.989 jiwa yang tersebar di 72 UPT pada delapan kabupaten yang berasal dari berbagai

daerah asal di Indonesia seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur serta pengungsi dan korban bencana alam. Daerah yang ditempati antara lain delapan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Delapan Kabupaten
di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan UPT tahun 2018

No	Kabupaten	UPT	KK	Jumlah (orang)
1	Pasaman Barat	12	3.764	16.048
2	Sawalunto/ Sijunjung	8	2.672	10.889
3	Dharmasraya	22	12.714	55.874
4	Pesisir Selatan	13	4.931	20.175
5	Kep. Mentawai	6	1.511	6.043
6	Padang Pariaman	1	50	277
7	50 Kota	4	1.637	6.98
8	Solok Selatan	6	2.294	9.699
Jumlah		72	29.573	125.989

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat 2018.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sampai tahun 2018, Kabupaten Dharmasraya termasuk kabupaten yang terbanyak menerima program transmigrasi, yaitu 22 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Semakin banyak warga transmigrasi tentu semakin beragam etnik yang ada di daerah tersebut, dibanding sebelum masuk program transmigrasi.

Nagari Sitiung yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya, merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi yang memiliki jumlah penduduk banyak. Menurut hasil sensus penduduk terakhir pada tanggal 30 juni 2018, dengan luas wilayah 87,68 hektar dan jumlah penduduk 8,463 jiwa, dengan jumlah laki-laki lebih besar dibanding dengan penduduk perempuan dengan perbandingan 13,626 laki-laki dan 13,023 perempuan. Jadi jumlah penduduk Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya 26,649 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Dharmasraya). Dengan masyarakatnya terdiri dari multikultural yaitu memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sehingga menciptakan integrasi sosial yang mana sebuah proses atau sistem yang mengalami pembauran. Sehingga menjadikan kesatuan yang utuh dan sebagai proses penyesuaian diantara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menciptakan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsinya masing-masing.

Interaksi sosial antara masyarakat etnik Minangkabau dan masyarakat etnik Jawa, sebagai etnik pendatang di Nagari Sitiung yang lebih mengedepankan sisi positif dari pluralisme terhadap etnik yang ada. Hal ini merupakan realitas sosial yang menarik dari keberadaan etnik Minangkabau yang dapat hidup berdampingan dengan etnik Jawa. Pada kenyataan tidak bisa dipungkiri bahwa interaksi sosial yang terjalin di kedua etnik, dengan berbagai latar belakang yang berbeda sangat rentan untuk terjadinya konflik.

Walaupun demikian masyarakat Nagari Sitiung dibingkai oleh perbedaan etnik, namun mereka tetap saling berintegrasi satu dengan yang lain. Integrasi sosial dalam masyarakat multikultural, memerlukan multikulturalisme yang dimaknai sebagai suatu bentuk kepercayaan dan sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaan dapat hidup berdampingan secara damai.

Sebagai sebuah prinsip multikulturalisme bukan sebuah dogma yang statis, akan tetapi adalah sebuah proses yang dinamis. Dengan memaknai diri dan orang lain dalam konteks yang terus berubah, merupakan sebuah proses yang membuat

setiap individu untuk terus belajar dari pengalaman kebersamaan dan untuk terus memperbaiki diri. Dalam memperlakukan sebuah perbedaan bukan berarti, setiap individu harus mengenali dan memiliki identitas pribadi yang kuat dengan sistem nilai yang jelas, namun tidak untuk merendahkan orang lain (Moeis, 2014:30).

Prinsip multikulturalisme tidak menghendaki lahirnya penggabungan paham yang menafikan perbedaan itu sendiri dengan memfokuskan perhatian pada titik kesamaan belaka. Prinsip mencari semata-mata titik kesamaan saja, dan menganggap bahwa dalam keragaman terjadi saling melengkapi kekurangan masing-masing, atau melahirkan satu pemikiran baru yang menjadi penengah, justru bertentangan dengan pemikiran multikulturalisme.

Hakikat multikultural yaitu, tidak mengarahkan orang melihat kepada persamaan atau kebaikan masing-masing untuk diakui satu sama lain, tetapi yang diperlukan adalah “kedewasaan” untuk melihat dan mengenali diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain yang berbeda. Disini dipakai istilah “kedewasaan” karena adanya tuntutan pada setiap individu untuk berpegang pada prinsip yaitu keteguhan jati diri, dengan kesadaran dan kemampuan diri (*awarrennes and competence*) untuk tidak merendahkan atau mendiskriminasi orang lain.

Cara pandang multikultural eksistensi perbedaan identitas, dan keteguhan pada prinsip tetap diakui. Namun, dalam hubungan antar budaya atau interaksi sosial setiap orang punya kesadaran dan kemampuan, untuk memperlakukan orang yang berbeda tanpa dengan diskriminasi inilah yang dimaksud “kedewasaan” yang mengandung dua hal yaitu kesadaran dan kemampuan multikultural (*awwarrennes and competence*).

Dalam multikulturalisme perbedaan dan karakteristik tiap kelompok dapat muncul ke ruang publik. Watson (2000:110) dalam Moeis (2014:35) menegaskan bahwa multikulturalisme terdapat beberapa dimensi seperti “*identity*” yang berarti didalamnya ada “*self respect*”. Disisi lain ada rasa memiliki terhadap suatu komunitas, agama, bangsa. Selain itu ada juga perasaan lokalitas seperti komitmen terhadap adat, bahasa, wilayah, dan juga rasa senasib dalam sejarah yang terwujud dalam keluarga dan persaudaraan. Semua itu adalah perbedaan dan keragaman yang tampak dalam kehidupan, maka multikulturalisme adalah prinsip yang dianut setiap orang untuk mengakui dan menghargai perbedaan dan keragaman itu. Gagasan yang terkait dengan “kedewasaan” adalah toleransi, istilah ini secara gamblang sering diucapkan dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari sebagai cara untuk berdampingan dengan orang yang berbeda. Namun bila dikaji secara mendalam, penerapan toleransi tidaklah mudah.

Dengan berbagai latar belakang budaya yang dimiliki masyarakat transmigrasi yaitu budaya Jawa dan budaya Minangkabau. Sedangkan masyarakat etnik Minangkabau sendiri yaitu memiliki budaya Minangkabau dengan kekhasan yang berbeda sehingga mereka dapat hidup berdampingan satu sama lain dengan bekerjanya integrasi sosial dalam institusi masyarakat multietnik berjalan dengan baik, institusi masyarakat yang dimaksud disini yaitu bagaimana nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku serta aturan dalam sebuah masyarakat itu bekerja dengan baik sehingga terciptanya integrasi sosial. Integrasi sosial yaitu menghilangkan perbedaan dan identitas masing-masing dengan menyatukan

berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga terbangunnya kehidupan yang serasi.

Berbeda dengan daerah lain penduduk transmigrasi merupakan sebuah masyarakat yang multietnik, dengan keberagaman budaya yang dimiliki masyarakat tersebut mereka bisa menjalani kehidupan sehari-harinya dengan serasi. Kehidupan yang serasi akan berjalan dengan baik disetiap negara apabila kehidupan pada sebuah nagarnya sudah serasi. Sedangkan di daerah tujuan transmigrasi lain pada umumnya terjadi konflik antar budaya misalnya:

Tabel 1.2
Nama Daerah Terjadinya Konflik

No	Nama Daerah	Penyebab	Sumber
1	Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.	- Ekonomi yang didominasi atau dikuasai oleh masyarakat pendatang/jawa. - Kurangnya masyarakat pendatang beradaptasi dengan masyarakat pribumi. Perebutan menjadi kepala desa.	Artikel : cyrli yusnita miyanti dkk. No. 2 Tahun 2017. Jurusan sosiologi antropologi, FISIP, UNES.
2	Desa Gampong Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar.	Unsur kebudayaan yang didominasi oleh penduduk pribumi.	Tesis : Nursusanti Tahun 2016. Fakultas FISIPOL Universitas Syiah Kuala.
3	Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konowe Provinsi Sulawesi Tenggara.	Sengketa tanah/ konflik agrarian antara penduduk transmigrasi dengan penduduk setempat.	Skripsi : Dasrul Yasuri Tahun 2015, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4.	Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara	Sengketa lahan yang menimbulkan korban jiwa.	Tesis : Karsadi Tahun 2002. Jurusan ilmu sosiologi UGM.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat transmigrasi yang berada di daerah lain memiliki kasus konflik seperti dalam persengketaan lahan, sertifikat hak kepemilikan tanah dan bangunan, serta kebudayaan yang terlalu kental dan perilaku pemuda-pemuda desa yang membuat terjadinya konflik. Berbeda dengan fenomena yang terjadi di Nagari Sitiung yang masyarakatnya yang multikultural

memiliki hubungan sosial yang baik dan terwujudnya kehidupan yang serasi, maka dari itu menarik untuk diteliti bagaimana terciptanya integrasi sosial masyarakat multietnik tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Nagari Sitiung sebagai salah satu daerah tujuan transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya yang semula penduduknya relatif homogen berubah menjadi penduduk yang multietnik. Hal itu selain masuknya warga transmigran dari etnik Jawa, juga munculnya etnik lain seperti Batak, Aceh, Melayu dan sebagainya karena berkembangnya ekonomi di daerah pemukiman transmigrasi di Sitiung. Walaupun terdiri dari berbagai etnik namun etnik yang dominan adalah etnik Minangkabau dan etnik Jawa. Dengan berbagai latar belakang budaya yang dimiliki, Nagari Sitiung memiliki dua etnik yang dominan maka ada dua budaya juga yang dominan. Yaitu budaya Jawa dan budaya Minangkabau. Sedangkan masyarakat etnik Minangkabau sendiri yaitu memiliki budaya minangkabau dengan kekhasan yang berbeda sehingga mereka dapat hidup berdampingan satu sama lain dengan bekerjanya institusi sosial masyarakat multietnik, institusi sosial masyarakat yang dimaksud di sini yaitu bagaimana nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku serta aturan dalam sebuah masyarakat itu bekerja dengan baik, sehingga menciptakan integrasi sosial yaitu menghilangkan perbedaan dan identitas masing-masing dengan menyatukan berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga terbangunnya kehidupan yang serasi.

Berbeda dengan daerah tujuan transmigrasi lain yang mengalami konflik diantara masyarakatnya yang berasal dari budaya yang berbeda. Seperti di

Lampung, program transmigrasi yang transmigrannya berasal dari etnik Jawa juga, terjadi konflik antar etnik, sehingga kehidupan sosial masyarakat tidak berjalan dengan baik. Di Sulawesi juga terjadi konflik di daerah tujuan transmigrasi, dimana salah satu etnik juga berasal dari Jawa. Di Aceh sebagai daerah tujuan transmigrasi yang salah satu etniknya adalah etnik Jawa yang merupakan warga transmigran juga terjadi konflik, sehingga warga transmigran kembali pulang ke daerah asalnya setelah mereka mulai berhasil mengolah lahan pertanian di lokasi transmigrasi. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bekerjanya institusi sosial masyarakat multietnik, sehingga terjadi integrasi sosial yang harmonis?
2. Bagaimana bentuk-bentuk integrasi sosial masyarakat multietnik sehingga mendukung terjadinya kehidupan sosial yang harmonis?

1.3 Tujuan Penelitian

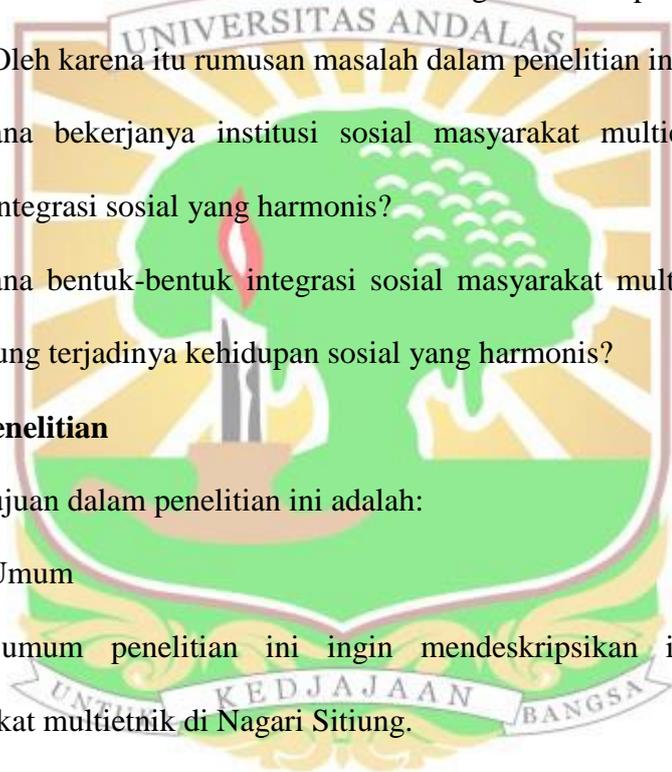
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini ingin mendeskripsikan integrasi sosial masyarakat multietnik di Nagari Sitiung.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis bekerjanya institusi sosial masyarakat multietnik, sehingga terjadi integrasi sosial di Nagari Sitiung.
2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk integrasi sosial masyarakat multietnik, sehingga mendukung terjadinya kehidupan sosial yang harmonis.



1.4. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Akademis
 - a. Secara akademis hasil penelitian ini menambah khasanah dan literatur tentang perkembangan ilmu sosiologi, khususnya dalam kajian masyarakat multietnik dan multikulturalisme.
 - b. Sebagai bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin mendalami masalah multikulturalisme.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah atau pengambil kebijakan dalam menciptakan integrasi sosial dan kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat multietnik.
 - b. Bahan masukan bagi para pihak dalam mewujudkan integrasi sosial yang serasi di daerah tujuan transmigrasi.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Integrasi Sosial

Integrasi sosial merupakan sebuah penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai dan lain sebagainya. Apakah dua kelompok masyarakat yang berbeda budaya etnis tidak mungkin dapat dipersatukan dan hidup secara berdampingan. Walaupun disebagian komunitas perseteruan sehingga menimbulkan konflik, tetapi ternyata beberapa komunitas yang lain perbedaan yang ada tidak selalu menimbulkan

konflik yang terbuka, keadaan inilah yang membuat adanya masyarakat yang terintegrasi (Bagong, 2010:203).

Jadi, integrasi sosial merupakan sebuah proses atau sistem yang mengalami pembauran, sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan sebagai proses penyesuaian diantara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menciptakan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsinya masing-masing.

1.5.1.1 Syarat Terjadinya Integrasi Sosial

1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka.
2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan (*consensus*) bersama mengenai nilai dan norma.
3. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten (Maryati & Suryawati, 2006:68).

1.5.1.2 Bentuk-Bentuk Integrasi Sosial

Menurut Wirutomo, dkk (2012: 36-37), integrasi sosial yang ada didalam kehidupan bermasyarakat dibedakan menjadi tiga bentuk sebagai berikut:

1. Integrasi Normatif, merupakan integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat.
2. Integrasi Fungsional, merupakan integrasi yang terbentuk sebagai akibat fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat.
3. Integrasi Koersif, merupakan integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa.

1.5.1.3 Proses Integrasi Sosial

Proses integrasi dapat dilihat melalui proses-proses berikut :

1. Asimilasi: merupakan perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan budaya aslinya atau sifat aslinya.
2. Akulturasi: merupakan proses sosial yang terjadi apabila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing (baru), sehingga kebudayaan asing (baru) diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri, tanpa meninggalkan sifat aslinya (Koentjaraningrat, 2005:155).

1.5.1.4 Faktor-Faktor Pendorong Integrasi Sosial

Faktor-faktor pendorong integrasi sosial meliputi sebagai berikut :

1. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda.
2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi.
3. Mengembangkan sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya.
4. Adanya sikap yang terbuka dengan golongan yang berkuasa.
5. Adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan.
6. Adanya perkawinan campuran (amalgamasi).
7. Adanya musuh bersama dari luar (Maryati & Suryawati, 2006:71).

1.5.2 Konsep Masyarakat Multietnik

Masyarakat secara sosiologis dapat diterjemahkan sebagai sekelompok individu yang anggotanya saling berinteraksi, berada di wilayah yang dimaknai sama, dan saling berbagi budaya. Masyarakat mengacu kepada manusia-manusia yang tinggal di wilayah dan berbagi budaya yang didefinisikan secara bersama. Istilah masyarakat berasal dari kata latin "*socius*" yang berarti persahabatan. Manusia membutuhkan masyarakat untuk hidup, bekerja dan menikmati hidup (Pujileksono, 2018:26).

Menurut Mac Iver dalam Pujileksono, (2018:27), "masyarakat adalah jaringan hubungan, merupakan kelompok terbesar dari individu-individu yang menghuni tempat yang sama dengan cara hidup yang sama sebagai hasil berinteraksi terus-menerus secara teratur dan pada akhirnya melahirkan pola perilaku yang relatif sama. Sedangkan menurut Soemardjan (1974:15) Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Jadi, masyarakat yaitu sekelompok individu yang hidup bersama dan mediami suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, dan anggotanya saling berinteraksi terus menerus dan pada akhirnya melahirkan pola perilaku yang relatif sama serta tujuan yang sama.

Multietnik adalah gabungan dari tiga kata sekaligus, yakni *multy* (banyak), *cultur* (budaya), *isme* (aliran/paham). Multietnik secara singkat adalah sebuah paradigma tentang kesetaraan semua ekspresi budaya artinya, tidak ada pembedaan *stereotype* antara kebudayaan suku '*primitif*' dan peradaban masyarakat industri modern. Keduanya memiliki kesetaraan nilai, dan peran yang

dalam mengabadikan kekhususan peran sosial historis masing-masing (Maffud dkk, 2015:17).

Jadi, masyarakat multietnik adalah suatu masyarakat yang struktur penduduknya terdiri dari beragam etnik, dan keragaman itu menjadi sumber keragaman kebudayaan atau subkultur dari masing-masing etnik, sehingga melahirkan suatu masyarakat yang kita sebut masyarakat multikultural (Liliweri, 2005:62).

1.5.3 Konsep Institusi Sosial

Institusi yang dimaksud dalam konsep sosiologi berbeda dengan konsep yang umum digunakan. Institusi yang dimaksud bukan sebuah bangunan, bukan sekelompok orang, dan juga bukan sebuah organisasi, akan tetapi institusi merupakan suatu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang dipandang oleh masyarakat penting, atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia yang mana proses-proses terstruktur untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu (Horton dan Hunt, 1984:224). Koentjaraningrat mendefinisikan lembaga sosial sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan sosial yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat. Berbagai macam lembaga sosial yang ada memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Soekanto memberi contoh beberapa institusi sosial yang ada di masyarakat antara lain; lembaga keluarga, lembaga perkawinan, lembaga pendidikan, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan lembaga agama.

Sosiologi melihat bahwa sebuah institusi sosial merupakan seperangkat peran yang dikemas dalam sebuah kewenangan yang terbentuk secara konsisten oleh pola-pola tindakan atau perilaku yang sudah diakui dan mempunyai sanksi oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Tujuan institusi sosial adalah membimbing tindakan atau perilaku individu sebagai anggota suatu kelompok atau masyarakat mengajarkan cara-cara bagaimana setiap individu dan kelompok memenuhi kebutuhan mereka (Liliweri, 2010:20).

Menurut E.B. Reuter, dalam Sunarto, (1985:201), “institusi merupakan sebuah sistem yang terorganisasi dari praktek-praktek dan peranan-peranan sosial yang muncul disekitar nilai atau serangkaian nilai, dan perlengkapan yang muncul untuk mengatur praktek-praktek tersebut serta menjalankan aturan-aturan. Jadi, institusi merupakan sebuah aturan-aturan yang terdapat nilai-nilai dan norma-norma di dalam masyarakat.

Institusi-institusi berada dipusat perhatian sosiologi. Karena institusi-institusi merupakan unsur-unsur utama yang membentuk masyarakat. Jumlah institusi serta tingkatan spesialisasinya berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Peradaban yang tinggi serta masyarakat-masyarakat industri modern ditandai oleh spesialisasi yang tinggi pada institusi-institusi yang disusun di sekeliling masalah-masalah tertentu di dalam kehidupan sosial, dan oleh perluasan pembagian subsistem-subsistem di dalam institusi yang lebih besar (Sunarto, 1985:202).

Menurut Sunarto (1985:202), bahwa pengakuan dari kebanyakan ahli sosiologi paling sedikit terdapat empat perangkat atau kompleks institusi penting. Setiap kelompok dapat dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

1. Institusi politik yaitu institusi yang menangani urusan pelaksanaan kekuasaan, dan yang mempunyai monopoli untuk menggunakan paksaan secara sah. Serta yang mengurus hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain, termasuk perang, juga dianggap tergolong di dalam kategori politik.
2. Institusi ekonomi yaitu institusi yang menangani urusan produksi dan distribusi barang dan jasa.
3. Institusi ekspresif-institusi integratif yaitu termasuk institusi yang menangani kesenian, drama, dan rekreasi. Dan mencakup pula institusi-institusi yang menangani gagasan-gagasan dan pemindahan nilai-nilai yang diterima. Disini kita bisa memasukan organisasi-organisasi ilmiah, kegamaan, filsafat, dan pendidikan.
4. Institusi kekerabatan yaitu institusi yang terutama dipusatkan di sekitar masalah pengaturan jenis kelamin dan menyediakan suatu kerangka yang stabil serta aman bagi pemeliharaan serta pengasuhan anak.

Seperangkat institusi membentuk suatu sistem sosial, dan institusi dapat dianggap sebagai subsistem dari sistem sosial ini. Istilah “sistem sosial” sebagaimana halnya dengan banyak istilah lain dalam sosiologi, dipakai untuk menggambarkan tingkatan kompleksitas yang cukup berbeda. Dengan demikian tidak jarang orang berbicara mengenai sistem sosial sebagai suatu satuan kecil,

seperti sebuah desa atau bahkan suatu gang sudut jalan, dan sebagai satuan yang besar, seperti suatu negara (Sunarto, 1985:203).

Sedangkan menurut seorang ahli sosiologi yaitu Sumner dalam (Soekanto, 2003:199), melihat dari sudut kebudayaan, mengartikan institusi sosial sebagai perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pentingnya adalah agar ada keteraturan dan integrasi dalam masyarakat. Institusi kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah-laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah-laku anggota-anggotanya.

Fungsi-fungsi di atas menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu harus pula diperhatikan secara teliti institusi-institusi kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan.

1.5.3.1 Proses Pertumbuhan Institusi Kemasyarakatan

Institusi kemasyarakatan tidak langsung tumbuh begitu saja, namun melalui proses dan tahapan. Berikut ini digambarkan tahapan tumbuhnya institusi kemasyarakatan tersebut.

1. Norma-norma Masyarakat, supaya hubungan antar manusia di dalam masyarakat terlaksana seperti yang diharapkan, maka dirumuskan norma-norma masyarakat. Awalnya norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja. Namun lama-kelamaan norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Norma-norma yang ada di dalam masyarakat, mempunyai kekuatan yang mengikat berbeda-beda. Ada norma yang lemah, sedang dan sampai yang terkuat daya ikatannya. Pada akhirnya anggota-anggota masyarakat tidak berani melanggarnya. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, secara sosiologi dikenal dengan empat pengertian, yaitu:

- a. Cara (*usage*) menunjuk pada suatu bentuk perbuatan yang menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Apabila terjadi penyimpangan tidak akan mendapatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungkannya.
- b. Kebiasaan (*folkways*) merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, bahwa banyak orang yang menyukai perbuatan tersebut. Menurut Mac Iver dan Page kebiasaan tersebut merupakan perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat.
- c. Tata kelakuan (*mores*) merupakan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Supaya masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut, walaupun ada pihak

yang memaksakan dan ada yang melarangnya. Tata kelakuan sangat penting karena: 1) tata kelakuan memberikan batas-batas pada perilaku individu, 2) tata kelakuan mengidentifikasi individu dengan kelompoknya, dan 3) tata kelakuan menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Jadi tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat, dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi *custom* atau adat-istiadat.

- d. Adat-Istiadat (*custom*) merupakan perbuatan individu atau anggota masyarakat yang melanggar akan menderita sanksi keras, walaupun secara tidak langsung diperlakukan.

Jadi pada sebuah institusi kemasyarakatan yang berlaku sungguh-sungguh, apabila ada faktor paksaan tergantung dari pertimbangan-pertimbangan kesejahteraan, gotong-royong, kerjasama dan sebagainya. Suatu norma tertentu dikatakan telah berproses apabila norma tersebut, diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati dan dihargai (Soekanto, 2003:201).

2. Sistem Pengendalian Sosial (*Social Control*)

Sistem pengendalian sosial diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparaturnya. Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya atau individu dengan suatu kelompok sosial. Tujuan pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat. Sistem pengendalian sosial terutama

bertujuan untuk mencapai kedamaian mealalui keserasian antara kepastian dengan keadilan kesebandingan. Pengendalian sosial memiliki dua sifat yaitu *preventif* (pencegahan) atau *represif* (pengembalian), sedangkan pada proses pengendalian sosial juga dapat dilaksanakan dengan paksaan (*coercive*) atau tanpa kekerasan (*persuasive*) (Soekanto,2003:205).

1.5.3.2 Ciri-Ciri Umum Institusi Kemasyarakatan

Menurut Gillin dan Gillin di dalam karyanya yang berjudul *General features of sosial instititions*, telah menguraikan beberapa ciri umum institusi kemasyarakatan sebagai berikut:

1. Suatu institusi kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Institusi kemasyarakatan terdiri dari adat-istiadatnya, tatakelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua institusi kemasyarakatan. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan baru akan menjadi bagian institusi kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relatif lama.
3. Institusi kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi institusi yang bersangkutan, apabila dipandang dari sudut kebudayaan secara keseluruhan.

4. Institusi kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai institusi bersangkutan.
5. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas dari institusi kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi institusi yang bersangkutan.
6. Suatu institusi kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tak tertulis, yang merumuskan tujuan, tata-tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi institusi itu dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, di mana institusi kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya (Soekanto, 2003:209).

Jadi, apabila dikaitkan dengan penelitian ini institusi yang kita bahas yaitu bagaimana institusi masyarakat atau nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku serta aturan dalam sebuah masyarakat itu bekerja dengan baik. Institusi merupakan unsur-unsur utama yang membentuk masyarakat. Dengan demikian institusi membentuk seperangkat suatu sistem sosial.

1.5.4. Konsep Masyarakat Multikultural

Menurut Watson, (2000:110) dalam bukunya *Multiculturalism*, dalam Moeis, (2014:29) bahwa, “*multiculturalism, as a principle to be acted upon, requires from us all a receptivity to difference, an openness to change, a passion for equality, and ability to recognize our familiar selves in the strangeness of others.*” (multikulturalisme adalah suatu prinsip bertindak, yang menghendaki kita semua untuk bersifat menerima perbedaan, terbuka terhadap perubahan,

perhatian terhadap kesetaraan, dan mampu mengenali diri sendiri dalam kaitan dengan perbedaan pada diri orang lain).

Dengan imbuhan “*isme*” menjadikan multikultural adalah paham atau ideologi yang ada dalam diri setiap orang. Dilihat dari pengertian diatas di dalamnya terdapat tiga unsur: 1. Kemampuan bertindak (pengetahuan, sikap dan perilaku), 2. Landasan untuk bertindak itu adalah “kehendak” atau “kesadaran” untuk menerima perbedaan, keterbukaan pikiran, orientasi anti diskriminasi, dan 3. adalah kemampuan mengenali diri, artinya setiap pribadi harus memiliki jati diri atau integritas moral dalam hubungan dengan orang lain yang berbeda, di sini yang dimaksud adalah perpaduan antara kesadaran diri berkenaan dengan karakter, dan kemampuan menyadari keberadaan orang lain (Moeis, 2014:29).

Menurut Usman Pelly dalam (Suardi, 2017:3), masyarakat multikultural adalah membicarakan tentang masyarakat negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah, yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam hal ini masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas suku bangsa yang masing-masing mempunyai struktur budaya (*culture*) yang berbeda-beda. Dalam hal ini masyarakat multikultural bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen dimana pola hubungan sosial antar individu dimasyarakat bersifat toleran dan harus menerima kenyataan hidup untuk berdampingan secara damai (*peace co-existence*) satu sama lain dengan perbedaan yang melekat pada tiap entitas sosial dan politiknya. Oleh karena multikulturalisme dijadikan sebagai acuan utama terbentuknya masyarakat multikultural yang damai, masyarakat multikultural

sangat mungkin terjadi konflik vertikal dan horizontal yang dapat menghancurkan masyarakat tersebut.

Menurut Mahrus, M., & Muklis, M Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Hal ini terbukti di Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang masing-masing mempunyai struktur dan budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan bahasa, adat istiadat, religi, tipe kesenian, dan lain-lain. Pada dasarnya suatu masyarakat dikatakan multikultural jika dalam masyarakat tersebut memiliki keanekaragaman dan perbedaan. Keragaman dan perbedaan yang dimaksud antara lain, keragaman struktur budaya yang berakar pada perbedaan standar nilai yang berbeda-beda, keragaman ras, suku, dan agama, keragaman ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, raut muka, postur tubuh, dan lain-lain, serta keragaman kelompok sosial dan masyarakat. Sedangkan menurut Gunawan, K., & Rante, Y masyarakat kultural dapat diartikan sebagai: (1) Perlakuan terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat. (2) Perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. (3) Kesederjatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. (4) Penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. (5) Unsur kebersamaan, kerja sama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan.

Ide multikulturalisme menurut Taylor merupakan sebuah gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri (*politics of recognition*). Gagasan ini menyangkut

pengaturan relasi antara kelompok imigran masyarakat adat dan lain-lain. Sedangkan menurut Supardi Suparlan mengungkapkan bahwa multikultural adalah sebuah ideology yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Oleh karena, konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa (*ethnic*) atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan kebudayaan dalam kesederajatan. Berkaitan dengan konflik sosial, multikulturalisme merupakan paradigma baru dalam upaya merajut kembali hubungan antar manusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana konflik. Jadi secara sederhana, multikulturalisme dapat dipahami sebagai suatu konsep keanekaragaman budaya dan kompleksitas dalam masyarakat. Melalui multikulturalisme masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi toleransi, kerukunan dan perdamaian bukan konflik atau kekerasan dalam arus perubahan sosial. Meskipun berada dalam perbedaan sistem sosial berpijak dari pemikiran tersebut, paradigma multikulturalisme diharapkan menjadi solusi konflik sosial yang terjadi pada saat ini (Suardi, 2017:3-4).

Demikian dapat disimpulkan bahwa multikultural didefinisikan sebagai keragaman atau perbedaan budaya dengan budaya lain. Sehingga masyarakat multikultural merupakan sekelompok orang yang tinggal dan hidup menetap di tempat yang memiliki karakteristik sendiri dan budaya yang mampu membedakan antar satu komunitas yang lain. Dan setiap komunitas akan menghasilkan budaya masing-masing yang khas dalam masyarakat.

Jadi multikulturalisme menunjuk pada keadaan sebuah masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok atau suku-suku bangsa yang berbeda kebudayaan, tetapi terikat oleh suatu kepentingan bersama yang bersifat formal dalam suatu wilayah. Dengan adanya keanekaragaman kebudayaan tersebut diperlukan adanya sikap saling menghormati, saling menyesuaikan diri antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dan unsur-unsur kebudayaan yang lain dengan tetap berpegang pada nilai, norma dan kepribadian bangsa sehingga kehidupan masyarakat akan tetap seimbang, tentram, dan damai. Dengan adanya keanekaragaman unsur-unsur budaya tersebut, pastilah akan terjadi interaksi, baik langsung maupun tidak langsung, interaksi tersebut akan berpengaruh baik secara sadar maupun tidak sadar akan menyebabkan perubahan-perubahan (Boty, 2017:4-5).

1.5.4.1 Bentuk dan Ciri-Ciri Masyarakat Multikultural

Adapun bentuk-bentuk dan ciri-ciri masyarakat multikultural sebagai berikut :

1. Interseksi

Interseksi merupakan suatu titik potong atau pertemuan. Dalam sosiologi interseksi dikenal sebagai suatu golongan etnik yang majemuk, yaitu persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi. Seperti suku, agama, jenis kelamin, kelas sosial dan lain-lain suatu masyarakat majemuk.

Interseksi terbentuk melalui pergaulan yang intensif dari anggotanya melalui sarana pergaulan dalam kebudayaan manusia seperti bahasa, kesenian, sarana transportasi, pasar dan sekolah. Jadi interseksi adalah suatu masyarakat yang

terdiri dari banyak suku, budaya, agama dan lain-lain yang berbaur menjadi satu kesatuan di dalam komunitas tertentu.

2. Konsolidasi

Konsolidasi merupakan suatu proses penguatan pemikiran atas kepercayaan yang telah diyakini agar kepercayaan akan sesuatu yang diyakini semakin kuat. Yang mana hal ini dilakukan oleh orang yang lebih mengerti akan kepercayaan yang dianut. Jadi konsolidasi adalah suatu penguatan atas apa yang telah melekat pada dirinya.

3. Primordialisme

Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang di dalam lingkungan pertamanya. Primordialisme berasal dari bahasa latin yaitu *primus* yang artinya pertama dan *terdiri* yang artinya tenunan atau ikatan. Jadi, primordialisme merupakan suatu kepercayaan yang sudah mendarah daging. Maka setiap orang yang memiliki primordial dia pasti akan sulit menerima paham lain selain paham yang telah mendarah daging dalam dirinya (Ivan Hadar, Bentuk Masyarakat Multikultural, Kompas 26 Januari 2017).

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional yang mana prinsip dasar teori pilihan rasional berasal dari ekonomi klasik. Sedangkan dalam sosiologi dipopulerkan oleh James Coleman. Teori ini menjadi populer ketika Coleman membuat jurnal *Rationality and Society* pada tahun 1989 yang bertujuan

untuk menyebarkan pemikiran yang berasal dari perspektif rasional. Teori pilihan rasional merupakan tindakan rasional dari individu atau aktor untuk melakukan suatu tindakan yang berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan (Ritzer, 2007:391).

Asumsi teori pilihan rasional adalah, bahwa setiap orang yang bertindak secara sengaja kearah suatu tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Sedangkan secara teoritis ia lebih memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi, yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkat pilihannya. Teori pilihan rasional ini lebih memusatkan perhatiannya pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud, artinya aktor mempunyai dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun juga dipandang mempunyai pilihan atau nilai, keperluan yang penting adalah sebuah kenyataan yang mana tindakan itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihannya (Ritzer, 2007:194).

Apabila dikaitkan dengan penelitian integrasi sosial masyarakat multietnik. Yang mana etnik tersebut yaitu etnik Jawa dan etnik Minangkabau, kedua etnik tersebut ini akan menjadi aktor. Disini akan dijelaskan bahwa etnik Jawa dan etnik Minangkabau melakukan tindakan berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu berdasarkan nilai atau pilihan. Tindakan itu akan kita lihat seperti etnik Jawa melakukan penyesuaian diri terhadap etnik Minangkabau, dan sebaliknya etnik Minangkabau melakukan penyesuaian diri terhadap etnik Jawa. Selanjutnyaapa

yang menjadi tujuan etnik Minangkabau melakukan penyesuaian diri terhadap etnik Jawa dan apa yang menjadi tujuan etnik Jawa melakukan penyesuaian diri terhadap etnik Minangkabau. Disini terlihat bahwa etnik Minangkabau mencapai tujuan-tujuan yang dilakukan tersebut dan etnik Jawa mencapai tujuan-tujuan yang dilakukan tersebut. Tindakan-tindakan seperti apa yang dilakukan antara etnik Minangkabau dan etnik Jawa bisa menciptakan pembauran yang terintegrasi secara baik sehingga tercapainya tujuannya tersebut.

Demikian kesimpulannya di Nagari Sitiung sikap dan perilaku etnik Minangkabau dan etnik Jawa dalam melakukan pembauran dan nilai-nilai apa yang dianut, dan tindakan-tindakan seperti apa atau siasat apa yang etnik Minangkabau dan etnik Jawa lakukan untuk mencapai tujuan yang sama tersebut. Jadi yang akan kita lihat disini seorang individu menginterpretasikan dirinya terhadap tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yang mana tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan.

Jadi peneliti melihat tujuan ataupun nilai-nilai yang dipakai etnik Jawa dan etnik Minangkabau. Untuk melakukan penyesuaian sehingga tujuannya tercapai, yang mana tujuannya yaitu untuk menciptakan integrasi sosial masyarakat multietnik di Nagari Sitiung. Sesuai dengan teori pilihan rasional yang mana setiap individu melakukan tindakan atau perilaku sosial berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh individu tersebut, dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut dipikirkan secara matang dengan pertimbangan rasional.

1.5.6 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan bagian dari sebuah proposal penelitian yang berisikan informasi-informasi yang diperlukan dari jurnal, buku, dan kertas kerja (*working paper*). Penelitian relevan dapat menginformasikan kepada diri sendiri dan pembaca mengenai hasil-hasil studi yang berkaitan erat dengan topik penelitian, menghubungkan studi yang akan dilakukan dengan studi-studi yang pernah dilakukan sebelumnya, menghubungkan studi yang akan dilakukan dengan topik yang akan lebih luas yang sedang dibicarakan, serta menyediakan kerangka atau bingkai untuk penelitian (Afrizal, 2014:122-123).

Riset mengenai integrasi sosial bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Kajian mengenai integrasi sosial dalam masyarakat multietnik telah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain adalah: Hidayah Ela (2014) yang berjudul, “Integrasi sosial pada masyarakat perkotaan (kasus pada masyarakat di komplek griya az-zahra 2, Kecamatan Banjar Kota Banjar)”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, integrasi sosial adalah proses mempersatukan berbagai kelompok dalam masyarakat melalui identitas bersama dengan menghilangkan perbedaan dan identitas masing-masing, akan tetapi pada masyarakat perkotaan sulitnya terjadi integrasi sosial karena masyarakatnya bersifat heterogen. Adapun tujuan penelitian ini yaitu membahas bagaimana bentuk integrasi sosial pada masyarakat perkotaan yang terjadi di komplek griya az-zahra dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat perkotaan yang terjadi di komplek griya az-zahra.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk integrasi sosial pada masyarakat perkotaan yang terjadi di komplek griya az-zahra 2, Kecamatan Banjar Kota Banjar, termasuk bentuk integrasi asosiasi (perkumpulan). Dimana bentuk menjalin integrasi sosial dengan masyarakat, warga komplek sering mengadakan perkumpulan dalam rangka menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat. Integrasi sosial di komplek griya az-zahra 2 ini cenderung lebih menunjukkan akulturasi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya integrasi sosial di komplek griya az-zahra 2 yaitu : (1) mayoritas masyarakat memiliki kepentingan dan keinginan yang sama. (2) sebagian besar masyarakat masih membawa pengaruh dari tempat tinggal yang lama. (3) masyarakat berusaha untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan yang ada didalam masyarakat. (4) dijalinnya suatu komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Selanjutnya penelitian Khairunnas .M (2017) yang berjudul, “Integrasi sosial antara etnis Cina dan etnis Aceh (studi deskriptif pada etnis Cina dan etnis Aceh di Kota Juang Kabupaten Bireuen)”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, di Aceh sendiri terdapat salah satu daerah yang strategis yaitu Kabupaten Bireuen. Namun secara budaya, masyarakat Bireuen adalah homogen dimana masyarakatnya memiliki budaya yang sama baik dalam pernikahan kehidupan sosial dan adat istiadat. Dikarenakan lokasinya yang strategis Bireuen menjadi pusat perdagangan bagi para pendatang salah satunya oleh etnis Thionghoa. Etnis Aceh yang kental nilai-nilai kerukunan dan keragamannya hidup berdampingan dengan etnis Thionghoa yang kini berdagang dan menetap di Kabupaten Bireuen.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu, membahas bagaimana cara menginterpretasikan dan menganalisis bagaimana pola interaksi sosial serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya integrasi antara etnis Cina dan etnis Aceh di Kota Juang Kabupaten Bireuen. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan dimana bahwa kebersamaan antara etnis Cina dan etnis Aceh didorong oleh berbagai faktor terjadinya integrasi antara lain dengan menerapkan sikap toleransi, memahami perbedaan dan menerima hidup secara berdampingan serata tidak membedakan latar belakang kesukuannya sehingga hubungan berlangsung dengan harmonis. Hubungan yang baik ini ditandai dengan tingginya intensitas dalam berinteraksi antar masyarakat dan ada upaya menjaga dan keharmonisan bersama. Interaksi dan kerjasama antara masyarakat berjalan dengan baik bahkan hingga terjadi perkawinan campuran antara suku. Kesadaran masyarakat lokal atau etnis Aceh dan etnis Cina untuk hidup berdampingan sudah terlihat dari aktivitas mereka sehari-hari dalam berinteraksi. Komunikasi yang dibangun oleh mereka pada dasarnya berazaskan bhineka tunggal ika.

Jadi, perbedaan semua penelitian dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu berbicara tentang bagaimana bentuk-bentuk integrasi sosial dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadi integrasi sosial yang terjadi di daerah multietnik tersebut, selanjutnya perbedaan itu terlihat dari bagian fokus kajian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian.

Sementara penelitian yaitu melihat bagaimana bekerja nilai-nilai istitusi lokal kedua etnik, yang mana etnik dominannya yaitu etnik Minangkabau dan

etnik Jawa, dalam membangun kehidupan sosial yang baik, dan terciptanya integrasi sosial di Nagari Sitiung.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian dipahami sebagai sudut pandang yang dipakai oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Konsep pendekatan penelitian lebih mengacu kepada perspektif teoritis yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk pengumpulan dan analisis data yang dipakai oleh peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan integrasi sosial masyarakat multietnik di Nagari Sitiung dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Afrizal, 2014:11).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud memberi gambaran yang mendalam, sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian yang bersifat deskriptif ini berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai masalah yang diteliti, yaitu integrasi sosial masyarakat multietnik di Nagari Sitiung.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan merupakan narasumber dalam penelitian yang berfungsi untuk menjangking sebanyak-banyaknya data dan informasi yang berguna bagi

pembentukan konsep dan preposisi sebagai temua penelitian (Bungin, 2003:206). Menurut Afrizal (2014:139) untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukannya informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Dalam penelitian ini informannya yaitu kelompok masyarakat, seperti anggota masyarakat dan tokoh masyarakat yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri.

Penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan cara mencari informan-informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti sebelum melakukan penelitian, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2014:140).

Jumlah informan yang diperlukan dalam penelitian ini berdasarkan asas kejenuhan data, tidak berarti informasi dari informan-informan dirasakan sudah menjawab maksud dan tujuan penelitian, maka proses pengumpulan data dapat dihentikan. Menurut Afrizal (2014:140) penelitian kualitatif bukan mencari banyak jumlah yang diwawancarai, melainkan terhadap kualitas data yang dikumpulkan dalam hal ini validitas data. Jumlah yang ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu sebelum melakukan penelitian ditentukannya kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai informasi.

Adapun kriteria-kriteria informan tersebut antara lain:

1. Masyarakat Nagari Sitiung.
2. Sudah lama menetap di Nagari Sitiung minimal 10 tahun.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka peneliti sudah menentukan identitas-identitas informan yang diwawancarai sebagaimana tercantum pada table 1.3.

Table 1.3
Daftar Nama Informan Penelitian

No	Nama	Umur (Tahun)	Etnik	Lama Domisili (Tahun)
1.	Zulkifli Datuak Paduko	60	Minangkabau	60
2.	Mursalim Datuak Paduko Labiah	49	Minangkabau	49
3.	Hardi Soeharto	52	Minangkabau	52
4.	Suradi	52	Jawa	52
5.	Rohmanto	37	Jawa	37
6.	Mahili Datuak Paduko Majolelo	69	Minangkabau	69
7.	Ibnu Abbas Datuak Mangkuto	65	Minangkabau	65
8.	Julisman	47	Minangkabau	47
10.	Idris Sadri	51	Jawa	47
11.	Sriyati	48	Jawa	48
12.	Parianti	32	Jawa	32
13.	Elvita Erawati	46	Minangkabau	46
14.	Isra Dewi	32	Minangkabau	32
15.	Duriati	42	Minangkabau	42
16.	Riza Elvina	40	Minangkabau	40
17.	Nasri Yussalam	29	Minangkabau	29

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan data dari tabel informan penelitian menunjukkan bahwa, informan penelitian yang berasal dari etnik Minangkabau berjumlah 11 orang

sedangkan informan penelitian dari etnik Jawa berjumlah enam orang. Walau terdapat perbedaan dari jumlah informan dari kedua etnik. Informasi yang didapatkan dari semua informan penelitian antara kedua etnik sudah secara mendalam dan sesuai dengan tujuan dari penelitian.

1.6.3. Data Yang Diambil

Dalam penelitian ini, data yang diambil di lapangan adalah data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moloeng, 2004:112), sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selbihnya hanyalah data tambahan seperti data-data tertulis berupa dokumen yang mendukung data penelitian. Adapun data yang peneliti ambil di lapangan terdiri atas dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer atau data utama merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian dilapangan. Data primer didapatkan menggunakan teknik observasi yang diobservasi berupa aktivitas-aktivitas masyarakat dan yang berkaitan dengan bagaimana bekerjanya institusi masyarakat multi-etnik, sehingga terjadinya integrasi sosial di Nagari Sitiung. Seperti: kegiatan seni budaya serta aktivitas gotong-royong bersama membangun rumah adat. Sedangkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dalam penelitian ini adalah data mengenai opini, harapan yang dilakukan berkomunikasi dengan informan yang berkaitan dengan integrasi sosial masyarakat multi-etnik di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan berkomunikasi dengan informan penelitian kebanyakan dilakukan di Kantor Wali Nagari. Setelah peneliti sendiri

telah memberi tahu kepada informan maksud dan tujuannya. Apabila data yang didapatkan belum lengkap peneliti membuat janji selama tiga hari untuk melakukan wawancara kembali dirumahnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka yakni pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan-bahan tertulis, literatur hasil penelitian. Data sekunder diperoleh peneliti yaitu di Kantor Wali Nagari Sitiung melalui studi kepustakaan, seperti mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur-literatur yang berkaitan, yang digunakan untuk mendeskripsikan lokasi penelitian pada pembahasan bab dua. Serta penguat mengenai penelitian tentang integrasi sosial masyarakat multietnik di Nagari Sitiung.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data dan Proses Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Afrizal (2014:21) observasi adalah suatu aktivitas pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti di lapangan dengan menggunakan panca indera. Peneliti untuk mengetahui sesuatu yang terjadi merasa perlu untuk melihat, mendengarkan, atau merasakan sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Jenis observasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah *observasi non partisipan*, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti tidak terlibat dalam setiap kegiatan obyek yang ditelitinya. Data wawancara yang diperoleh dari teknik observasi

penelitian ini terdiri dari pemberian informasi tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang diamati. Hal ini seperti mengamati tingkah laku dan interaksi antara masyarakat etnik Minangkabau dan etnik Jawa yang menciptakan integrasi sosial yang baik.

Dalam penelitian ini hal-hal yang diobservasi seperti topografi wilayah, keadaan bangunan seperti tempat pertemuan, rumah ibadah serta benda-benda yang berkaitan dengan kebudayaan multietnik tersebut. Selain mengamati benda-benda kebudayaan juga diamati aktivitas-aktivitas masyarakat atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti: aktivitas ekonomi, aktivitas ibadah, aktivitas dalam acara pesta pernikahan atau perkawinan dan aktivitas dalam prosesi kematian.

Peneliti melakukan observasi lapangan pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 09.00 WIB di Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Hasil observasi yang didapat yaitu mengetahui jorong-jorong mana saja yang didiami oleh masyarakat etnik Jawa dan etnik Minangkabau saja, serta jorong mana yang ada didiami kedua etnik tersebut. Semua itu untuk mempermudah peneliti mencari informan yang pantas untuk menjawab tujuan penelitiannya.

Observasi juga dilanjutkan pada tanggal 22 Mei 2019 yaitu mengamati dan melihat secara langsung lahan pertanian yang berdampingan antara etnik Minangkabau dan etnik Jawa misalnya areal persawahan dan tanaman rumput untuk hewan ternak mereka. Disana terlihat bahwa adanya saling menghargai atas kepemilikan seperti lahan tanaman rumput untuk hewan ternak mereka. Misalnya

rumpun milik etnik Minangkabau tidak akan diambil oleh etnik Jawa walaupun pembatasnya hanya satu potong kayu yang ditancapkan. Mereka akan mengambil apabila sudah seizin etnik Minangkabau. Untuk areal persawahan ada namanya yang disebut pembatas antara sawah etnik Minangkabau dan etnik Jawa. Bapak Mursalim menjelaskan bahwa apabila sawah kita berdampingan dengan etnik Jawa maka pembatas sawah kita juga akan bersih seperti pembatas sawah mereka. Semua itu terlihat bahwa kerjasama mereka juga saling mendukung untuk terciptanya integrasi sosial yang baik.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan kepada informan penelitian untuk mendapatkan data tentang pengetahuannya, pendapatnya serta alasan-alasan melakukan sesuatu. Bila kita merujuk kepada (Afrizal, 2014:21) bahwa yang dimaksud dengan wawancara mendalam adalah sebuah wawancara yang dilakukan peneliti dengan tidak menyiapkan susunan pertanyaan dan alternatif jawaban sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan umum yang kemudian didetailkan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya.

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam (*indepth interview*) digunakan untuk mewawancarai informan guna memperoleh data dan informasi mengenai masalah penelitian. Wawancara mendalam merupakan suatu cara pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti (Bungin, 2003 :110).

Wawancara dilakukan sesuai kebutuhan, apabila tidak selesai dalam satu kali pertemuan. Maka peneliti akan membuat janji untuk bertemu kembali, tempat wawancara disesuaikan dengan keinginan informan, bisa dilakukan di rumah ataupun ditempat kerjanya. Setelah selesai wawancara sesampai di rumah hasil wawancara tersebut dilihat dan dengar kembali serta diperluas dalam bentuk catatan lapangan. Untuk memvalidkan data maka si peneliti akan melakukan triangulasi dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada tanggal 24 Mei 2019 mulai turun ke lapangan, yaitu yang menjadi tujuan kantor Wali Nagari Sitiung, dengan tujuan meminta izin melakukan penelitian lapangan di nagari tersebut. Peneliti menemui Bapak Wali Nagari Sitiung yang bernama Bapak Julisman. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan datang ke kantor wali nagari, yaitu untuk mendapatkan data seputar Nagari Sitiung.

Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 28 Mei 2019, wawancara dilakukan di kantor wali Nagari Sitiung. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan ke nagari ini dan menemui Bapak Zulkifli Datuak Paduko, selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan seputar topik penelitian. Setelah selesai, peneliti meminta foto bersama informan sebagai dokumentasi penelitian.

Selanjutnya wawancara dilaksanakan pada hari sama dengan Bapak Mursalim Datuak Paduko Labiah. Peneliti juga menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan peneliti ke nagari ini, setelah itu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan wawancara berdasarkan tujuan penelitian. Selanjutnya juga masih pada tanggal 28 Mei 2019, peneliti melanjutkan wawancara kepada Bapak Hardi

Soeharto. Peneliti juga menyampaikan maksud dan tujuan peneliti, setelah itu peneliti meminta ketersediaan Bapak Hardi Soeharto untuk diwawancarai dan setelah selesai wawancara, peneliti meminta untuk berfoto bersama Bapak Hardi Soeharto.

Pada tanggal 29 Mei 2019 peneliti melanjutkan wawancara di kantor wali nagari, yang mana pada hari sebelumnya sudah membuat janji dengan Bapak Heri Yanto. Bapak Heri Yanto menerima dengan senang hati, selanjutnya peneliti menjelaskan maksud dan tujuannya, setelah itu peneliti juga meminta ketersediaan Bapak Heri Yanto untuk diwawancarai, dan tidak lupa peneliti meminta foto dokumentasi wawancara penelitian.

Selanjutnya dengan hari yang sama peneliti juga mewawancarai Bapak Suradi di kantor wali nagari. Peneliti juga menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke nagari ini, setelah itu peneliti meminta ketersediaan Bapak Suradi untuk diwawancarai mengenai seputar topik peneliti. Selama proses wawancara Bapak Suradi dengan semangat menjawab semua pertanyaan peneliti ajukan. Setelah selesai wawancara peneliti meminta ketersediaan Bapak Suradi untuk meminta foto dokumentasi wawancara penelitian.

Pada hari yang sama juga dan tempat yang sama peneliti melanjutkan wawancara dengan Bapak Rohmanto. Disaat itu juga peneliti menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Bapak Rohmanto dan Bapak Rohmanto bersedia untuk diwawancarai, setelah itu peneliti juga meminta foto dokumentasi kepada Bapak Rohmanto.

Selanjutnya wawancara dilanjutkan pada tanggal 30 Mei - 01 Juni 2019, peneliti melakukan wawancara di rumah Ibuk Parianti, Ibuk Elvita Erawati, Ibuk Isra Dewi, Ibuk Duriati, dan Ibuk Riza Elfina. Peneliti mendatangi rumah ibuk tersebut masing-masing dan menyampaikan maksud dan tujuan peneliti, setelah itu masing-masing ibuk-ibuk tersebut diwawancarai, dan tidak lupa meminta foto dokumentasi wawancara penelitian.

Pada hari yang sama peneliti juga mewawancarai Ibuk Sriyati di Kantor PNPM Nagari Sitiung dan peneliti juga menyampaikan maksud dan tujuan peneliti. Sehingga Ibuk Sriyati bersedia untuk diwawancarai, setelah itu peneliti meminta foto dokumentasi wawancara penelitian.

Pada tahap akhir, peneliti melakukan triangulasi dengan Bapak Wali Nagari Sitiung yaitu, Bapak Julisman pada tanggal 02 Juni 2019. Peneliti menemui dan menyampaikan maksud serta tujuan penelitian, setelah itu meminta ketersediaan waktu Bapak Julisman untuk diwawancarai.

Selanjutnya triangulasi dilakukan peneliti pada tanggal 18 Juni 2019 yaitu, pada acara halal bihalal yang dilaksanakan di Nagari Sitiung. Yang mana disana akan terlihat pembauran antara etnik Minangkabau dan etnik Jawa, yang diamati seperti kerjasama dalam persiapan acara, adat istiadat yang dipakai, mulai dari makanan, pakaian, dan kesenian yang memeriahkan acara tersebut. Disanalah peneliti melakukan triangulasi dengan cara mengamati secara langsung bahwa masyarakat di Nagari Sitiung yang multietnik sudah terintegrasi kehidupan sosialnya yang harmonis.

Kendala yang dihadapi peneliti dalam melakukan wawancara tidak ada, karena peneliti melakukan wawancara disaat bulan puasa, dan pada bulan puasa masyarakat memiliki waktu luang. Didukung juga dengan masyarakatnya yang ramah dan terbuka kepada orang baru. Jadi disana saya juga menilai bahwa masyarakat yang multietnik di Nagari Sitiung bisa menciptakan pebauran kehidupan sosial yang harmonis. Dikarenakan masyarakatnya memahami satu sama lain dan mamiliki tujuan yang sama.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan dokumen. Dokumen yang dikumpulkan berupa bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Dokumen yang diambil antara lain: profil nagari, laporan-loparan nagari serta sejarah nagari kalau ada. Digunakan untuk mendeskripsikan lokasi penelitian pada bab dua.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus dan komponen yang akan diteliti, dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahan. Dari unit analisis itu data diperoleh, dalam artian kepada siapa atau apa, tentang apa, proses pengumpulan data diarahkan. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain obyek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian (Moloeng, 2001:49). Dalam penelitian ini yang menjadi unit

analisisnya kelompok yaitu masyarakat di Nagari Sitiung dengan kondisi integrasi sosial masyarakatnya yang harmonis.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah aktifitas yang terus menerus dilakukan dalam melakukan penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data sehingga pengumpulan data analisa berlangsung dari awal sampai akhir penelitian. Data tersebut sudah dikumpulkan dengan berbagai macam teknik seperti wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen (Afrizal, 2014:176).

Dalam hal ini analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif menggunakan prinsip yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi analisis data dapat dikategorikan menjadi menjadi tiga tahap secara garis besar, yaitu tahap kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodean terhadap data. Pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti. Cara melakukannya adalah peneliti harus menulis ulang setiap catatan-catatan lapangan yang dibuat, setelah itu peneliti membaca keseluruhan catatan lapangan dan memilih informasi yang penting dan yang tidak penting dengan cara memberi tanda-tanda (Afrizal, 2014:178).

Tahap penyajian data adalah tahapan lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian agar lebih efektif (Afrizal, 2014:179).

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahapan lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah dokumen diambil, peneliti mengecek kembali kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan (Afrizal, 2014:180).

1.6.7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian, merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan. Tempat tersebut tidak selalu mengacu kepada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah di Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Nagari Sitiung merupakan sebuah nagari yang penduduknya merupakan penduduk transmigrasi yang sudah menetap disana semenjak tahun 1976 yang terletak di kabupaten Dharmasyara. Adapun alasan mengapa memilih lokasi adalah:

1. Nagari Sitiung merupakan nagari yang memiliki penduduk transmigrasi yang berasal dari etnik Jawa, dan juga masuk etnik lain seperti Batak, Aceh dan Melayu.

2. Nagari Sitiung yang banyak memiliki penduduk transmigrasi bisa menciptakan hubungan sosialnya yang harmonis dibandingkan dengan daerah tujuan transmigrasi lainnya.

Berdasarkan pertimbangan lain kenapa memilih lokasi ini adalah pertimbangan non akademis, yaitu pertimbangan keamanan dan kemudahan peneliti dalam melakukan penelitian, karena peneliti sudah mengenal lapangan penelitian dan sudah familiar dengan warga sekitar di lokasi penelitian tersebut.

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

Agar konsep dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Integrasi Sosial

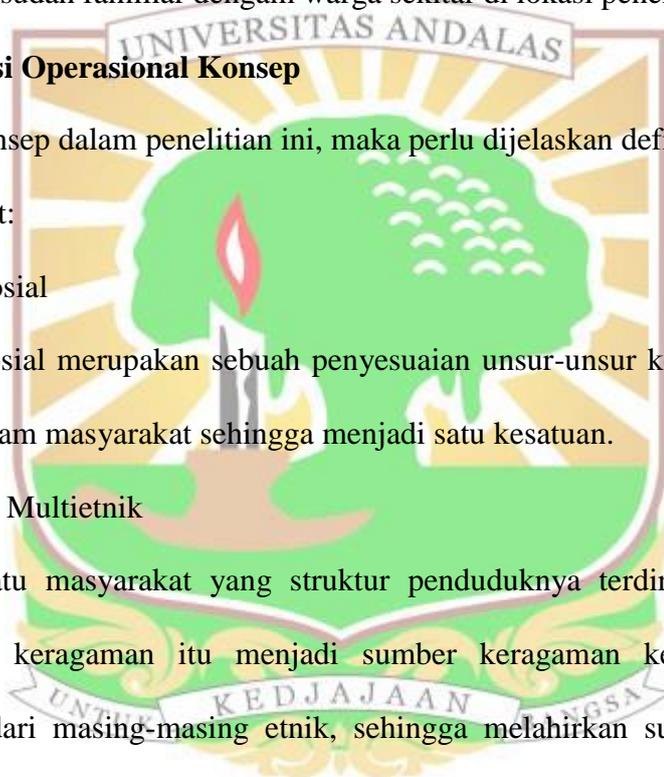
Integrasi sosial merupakan sebuah penyesuaian unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan.

2. Masyarakat Multietnik

Adalah suatu masyarakat yang struktur penduduknya terdiri dari beragam etnik, dan keragaman itu menjadi sumber keragaman kebudayaan atau subkultur dari masing-masing etnik, sehingga melahirkan suatu masyarakat yang kita sebut masyarakat multikultural.

3. Konsep Institusi Sosial Lokal

Institusi sosial lokal merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku serta aturan dalam sebuah masyarakat yang mengatur kehidupan dasar masyarakat setempat.



4. Masyarakat Mutikultural

Masyarakat multikultural berarti masyarakat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain.

1.6.9. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, mulai bulan April sampai bulan September 2019. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut :



Tabel 1.4
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2019					
		Bulan					
		April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept
1	Perbaikan Proposal						
2	Penyusunan Instrumen Penelitian						
3	Pengumpulan Data						
4	Analisis Data						
5	Penyusunan Laporan Penelitian						
6	Bimbingan Skripsi						
4	Ujian Skripsi						